

IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA GUNUNGKIDUL CERDAS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

IMPLEMENTATION OF THE GUNUNGKIDUL CERDAS SCHOLARSHIP PROGRAM AT THE JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN GUNUNGKIDUL REGENCY

Oleh: Rian Mustaufa, Universitas Negeri Yogyakarta
rianmustaufa.2019@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat implementasi program Beasiswa Gunungkidul Cerdas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Uji keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul dinilai telah berjalan dengan efektif berdasarkan aspek-aspek berikut: (a) Komunikasi dilaksanakan dengan intens melalui rapat koordinasi serta grup *WhatsApp*. (b) Sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, sumber daya informasi, dan finansial telah mencukupi. (c) Pada aspek disposisi, pelaksana program menyambut baik dan melaksanakan program sesuai dengan kompetensi masing-masing. (d) Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Adapun faktor pendukung program beasiswa, yaitu koordinasi yang berjalan intens, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan informasi yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu kuota beasiswa yang sedikit, nominal beasiswa yang kurang mencukupi, tidak adanya kontrol terhadap penggunaan dana, dan proses pencairan beasiswa lama.

Kata kunci: implementasi, beasiswa pendidikan, Gunungkidul Cerdas

Abstract

This study aims to describe the implementation as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of the Gunungkidul Cerdas Scholarship program. This research was conducted based on Edward III's policy implementation theory. This research is a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique uses Miles and Huberman data analysis techniques. The validity test of research data was carried out using triangulation techniques and sources. The results of the study can be concluded that the implementation of the Gunungkidul Cerdas Scholarship program at the junior high school level in Gunungkidul Regency is considered to have run effectively based on the following aspects: (a) Communication is carried out intensely through coordination meetings and WhatsApp groups. (b) Human resources, facility resources, information resources, and finances are sufficient. (c) In the disposition aspect, program implementers welcome and implement the program in accordance with their respective competencies. (d) The bureaucratic structure in the implementation of the program is determined based on the Decree of the Head of the Education Office of Gunungkidul District. The supporting factors of the scholarship program are intense coordination, human resources, infrastructure, and adequate information. While the inhibiting factors, namely a small scholarship quota, insufficient scholarship nominal, no control over the use of funds, and the old scholarship disbursement process.

Keywords: implementation, education scholarship, Gunungkidul Cerdas

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Perkembangan zaman sendiri menimbulkan persaingan yang semakin ketat dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan dalam menghadapi hal tersebut. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan pendidikan (Rachmawati, 2008: 2). Hal ini didukung dengan pernyataan dari (Farid Ahmadi dalam Unnes, 2017), bahwa pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi sebuah negara dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya dalam menghadapi persaingan global. Pendidikan menjadi proses mentransfer ilmu pengetahuan sekaligus membentuk karakter seseorang. Maka dari itu pendidikan sangat penting agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.

Pemenuhan atas hak memperoleh pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya. Dalam pembukaan UUD 1945 secara jelas telah diterangkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin pendidikan warga negaranya. Sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kemudian dalam ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Komitmen dalam melaksanakan amanat konstitusi negara tersebut,

pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Kemudian pasal Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan secara layak dan bermutu, serta menjadi bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin biaya pendidikan warga negaranya.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tentu tidaklah lepas dari berbagai dinamika permasalahan. Salah satu permasalahan dalam pendidikan Indonesia yang masih menjadi kendala hingga saat ini adalah kemiskinan. Berdasarkan data pada bulan Maret tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin di Indonesia berjumlah 26,16 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan 9,54 persen (<https://data.tempo.com>, 2022). Dilihat dari data tersebut menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia masih tinggi. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah tentunya memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang salah satunya yaitu bidang pendidikan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan dapat menjadi penghambat seseorang dalam memperoleh pendidikan yang layak (Ningrum dkk.,

2020: 213). Kondisi ekonomi yang rendah tersebut menyebabkan masyarakat khususnya anak usia sekolah yang semestinya mengenyam pendidikan dengan layak pada akhirnya urung mendapatkannya dikarenakan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Fenomena yang sering terjadi adalah adanya eksploitasi terhadap anak untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di sekolah malah harus bekerja menyokong kebutuhan ekonomi keluarganya (Nursita & P, 2022: 3). Kondisi ini menyebabkan anak harus mengalami putus sekolah demi membantu mencukupi kebutuhan. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kemiskinan dalam keluarga dapat menjadi kesengsaraan bagi anak-anak (Aitken et al., 2006; Ajisukmo, 2012; Davies, 2008; Irwanto et al., 1999; Moeliono & Dananto, 2004) (dalam Nursita, 2022: 4)

Fenomena siswa putus sekolah sendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat digambarkan dari masih banyaknya kasus putus sekolah yang dialami oleh anak usia sekolah. Merujuk pada data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ajaran 2019/2020 menunjukkan terdapat 157 ribu siswa putus sekolah yang mana sebanyak 38,5 ribu adalah siswa SMP (dikutip dari databoks.katadata.co.id, 2021). Kasus putus sekolah yang dialami oleh siswa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dan alasan. Seperti yang dikutip dari Kompas.com (diperbarui 4 Juni 2021) menjelaskan beberapa alasan mengapa anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor keterbatasan akses pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Yusup dkk., 2019: 46) bahwa permasalahan terkait ekonomi menjadi penyebab banyak

anak putus sekolah serta disebabkan ketersediaan akses dan sarana pendidikan yang sulit dijangkau. Dari faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah tersebut, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama dari putus sekolah. Pendapat ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmadinata (dalam Suyanto, 2010: 342) yang menjelaskan bahwa faktor utama dari putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karena orang tua tidak mampu menyediakan biaya untuk sekolah anaknya.

Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab mengelola kehidupan warga negara serta menjadi bagian dari pelaksanaan amanat perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan pendidikan kaitannya terhadap masyarakat ekonomi kurang mampu dalam upaya mencegah adanya anak putus sekolah. Program berupa bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi siswa kurang mampu tersebut terdiri atas beberapa jenis, antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Beberapa bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sebagai modal pembangunan bangsa. Program-program berupa pemberian bantuan pendidikan tersebut ditujukan kepada siswa yang memiliki kendala pendidikan utamanya keterbatasan ekonomi. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja. Namun, juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah dan masyarakat di daerah dalam mengelola

pendidikan di lingkup daerah masing-masing.

Kontribusi tersebut tercermin dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Adanya undang-undang tersebut memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satu kewenangan pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah adalah pengelolaan pendidikan di daerah yang menjadi bagian dari desentralisasi pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa pendidikan merupakan bagian dari urusan pemerintah yang *konkrue*, artinya pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi pendidikan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan di daerah, serta membuat kebijakan sesuai dengan permasalahan pendidikan yang ada baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu bagian dari DIY yang dikenal sebagai “pusat pendidikan” pada kenyataannya belum menjamin pendidikan di Kabupaten Gunungkidul menjadi maju. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih terdapat permasalahan-permasalahan pendidikan yang masih ditemukan di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu permasalahan klasik pendidikan di Kabupaten Gunungkidul yang masih banyak dialami

saat ini yaitu permasalahan mengenai putus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Gunungkidul tahun 2021 diketahui bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 adalah 7,30 atau terendah se-DIY. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun atau jenjang SMP di Gunungkidul pada tahun 2020 adalah 99,17%. Angka tersebut bahkan menurun dibanding tahun 2019 yaitu 99,37%. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi dataku Bappeda DIY tahun 2021, angka putus sekolah jenjang SMP di Gunungkidul mencapai 0,7% atau 18 anak SMP putus sekolah. Jumlah ini tentu masih sangat banyak dan menjelaskan masih banyak siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang SMP di Kabupaten Gunungkidul. Angka putus sekolah sendiri merupakan jumlah penduduk usia sekolah yang sudah tidak bersekolah kembali atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang (Ariyani, 2018: 442). Penyebab siswa putus sekolah sendiri cukup beragam tergantung pada jenjang sekolahnya. Berdasarkan data (BPS DIY, 2011) (dalam Ariyani, 2018: 442) penyebab putus sekolah yaitu kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan akses terhadap infrastruktur pendidikan yang cukup sulit. Data tersebut dikuatkan dengan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 (dikutip dari <https://jogja.tribunnews.com>, 2018) bahwa jumlah siswa SMP yang mengalami putus sekolah yaitu 810 anak dari 27.000 siswa. Penyebab putus sekolah tersebut disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang rendah yang menyebabkan anak lebih memilih untuk bekerja.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan putus sekolah khususnya pada

jenjang SMP tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan kebijakan pendidikan daerah yaitu Beasiswa Gunungkidul Cerdas. Program bantuan beasiswa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Adanya peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pemberian beasiswa ini menjadi bagian dari upaya dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Gunungkidul yang belum tercapai sampai saat ini. Hal ini disebutkan dalam pasal 52 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, “Untuk menunjang program wajib belajar pemerintah daerah menyediakan bantuan pendidikan dan/atau beasiswa kepada peserta didik selama mengikuti pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah”. Kemudian pada ayat (3) dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa, “Beasiswa pendidikan diberikan kepada peserta didik miskin dan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta peserta didik peraih medali pada lomba tingkat daerah, nasional, dan internasional”.

Berdasarkan kriteria tersebut, kemudian sekolah mengusulkan nama calon siswa penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa Gunungkidul Cerdas pada tahun tersebut.

Beasiswa Gunungkidul Cerdas sendiri merupakan turunan dari Program Gunungkidul Cerdas Pemerintah Daerah Gunungkidul untuk membantu siswa kurang mampu agar tetap dapat bersekolah. Program Gunungkidul Cerdas sendiri

merupakan program yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari program unggulan dalam pengembangan *smart city* di Kabupaten Gunungkidul. Program tersebut berfokus untuk siswa kurang mampu agar bisa melanjutkan sekolah serta sebagai bagian dari usaha menekan angka putus sekolah. Dana yang digunakan untuk merealisasikan Beasiswa Gunungkidul Cerdas sendiri merupakan dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul. Jumlah penerima beasiswa Gunungkidul Cerdas pada tahun 2022 yaitu 261 untuk penerima yang berasal dari SMP negeri dan swasta yang ada di Gunungkidul. Berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan, jumlah anggaran beasiswa setiap tahunnya tidak mengalami perubahan menyesuaikan dengan anggaran dari Pemerintah Gunungkidul. Masing-masing siswa penerima beasiswa mendapatkan bantuan pendidikan sejumlah 500 ribu rupiah. Kuota penerima beasiswa tersebut dapat berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. Melalui bantuan beasiswa tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak yang mengalami putus sekolah khususnya pada jenjang SMP di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian yang sama terkait topik diatas pernah dilakukan oleh Ulyatun Tasyak (2022) yang menunjukkan bahwa implementasi beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana di Desa Ponggok mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa yang bekerjasama dengan perusahaan lokal daerah. Penelitian lain yang dilakukan Yullya Putri Utami (2021) menjelaskan implementasi beasiswa daerah bagi mahasiswa berprestasi

dan kurang mampu di Kabupaten Lamandau yang bertujuan membantu mahasiswa dari Kabupaten Lamandau menyelesaikan perkuliahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara penelitian oleh Lisa Asmi Lubis (2022) menunjukkan bahwa implementasi beasiswa mahasiswa miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum efektif jika dilihat dari aspek-aspek yang diteliti dikarenakan komunikasi dan sumber daya yang kurang memadai.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi program Beasiswa Gunungkidul Cerdas jenjang SMP di Kabupaten Gunungkidul dan faktor pendukung serta penghambat implementasi beasiswa tersebut. Penelitian ini berfokus pada tingkat SMP sebagai indikator wajib belajar yang masih belum tercapai hingga saat ini di Gunungkidul. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena belum ada penelitian yang membahas mengenai implementasi program beasiswa Gunungkidul Cerdas pada jenjang SMP sebelumnya. Selain daripada itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena Beasiswa Gunungkidul Cerdas merupakan bagian dari program unggulan Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi angka putus sekolah yang selama ini menjadi permasalahan pendidikan yang belum usai di Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data,

serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan *sub-subheading*. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-12 bold, rata kiri. Sebagai contoh dapat dilihat berikut.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan implementasi dari program beasiswa Gunungkidul Cerdas pada tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, SMP N 1 Patuk, SMP N 1 Semanu, SMP N 3 Semanu, SMP N 1 Ponjong, SMP N 2 Ponjong, dan rumah orang tua siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada 31 Januari 2023 dan 7 Februari 2023-11 Maret 2023.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek penelitian, diantaranya Kepala Bidang SMP, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter jenjang SMP, Kepala Sekolah, dan Orang Tua Siswa. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi program beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul.

Prosedur

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan. Kegiatan wawancara untuk memperoleh informasi

terkait implementasi program beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan observasi dilakukan melalui pra observasi dari artikel, website, dan wawancara dengan salah satu pengelola program, serta observasi langsung ke lapangan. Kajian terhadap dokumen-dokumen berisikan kondisi interaksi pelaksana program juga dilakukan dalam untuk mengetahui pelaksanaan program tersebut. Dokumen tersebut diantaranya berupa foto, Ketentuan dan Kriteria Pelaksanaan Program, dan SK Kepala Dinas.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif diperoleh melalui proses wawancara mendalam terhadap narasumber dengan berdasar pada teori implementasi Edward III. Adapun teori Edward III (dalam Hasbullah, 2016: 99) didasarkan kepada empat indikator dasar, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pengkajian secara mendalam juga dilakukan terhadap Ketentuan dan Kriteria Pelaksanaan Program Beasiswa Gunungkidul Cerdas, SK Kepala Dinas, Surat Undangan Rapat Koordinasi, Struktur Organisasi Pelaksana, data kuota penerima beasiswa tiap sekolah tahun 2022, data siswa penerima beasiswa Gunungkidul Cerdas tahun 2022, dan foto kegiatan pertemuan, sarana prasarana, dan komunikasi melalui grup *WhatsApp*.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data yang diperoleh jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles dan

Huberman (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: 12-14). Tahapan dalam model analisis terdiri atas tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul

Hasil penelitian menggunakan teori implementasi milik Edward III (dalam Hasbullah, 2016: 99) untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul melalui empat indikator. Indikator tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis dapat ditunjukkan melalui hasil data sebagai berikut.

Pertama, komunikasi dilakukan secara intens antara implementor program beasiswa Gunungkidul Cerdas. Komunikasi dalam pelaksanaan program dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan sosialisasi program kerja Dinas Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai program kerja Dinas Pendidikan yang termasuk juga Program Beasiswa Gunungkidul Cerdas. Disisi lain, komunikasi terkait pelaksanaan program beasiswa ini juga memanfaatkan media grup *WhatsApp* baik komunikasi sekolah dengan dinas ataupun sekolah dengan orang tua siswa. Hal ini mendukung penyampaian informasi menjadi cepat diterima dan lebih efisien. Dalam pelaksanaannya selama ini, komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program beasiswa Gunungkidul Cerdas berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.



Gambar 1. Undangan rapat sosialisasi program kerja Dinas Pendidikan

Kedua, sumber daya yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program diantaranya sumber daya manusia, sumber daya material (fasilitas), sumber daya informasi, dan sumber daya finansial. Berkenaan dengan sumber daya manusia, Dinas dan sekolah melibatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan bekerja sesuai dengan tupoksi serta tanggung jawabnya masing-masing. Sumber daya manusia di sekolah yang dilibatkan berjumlah satu sampai tiga orang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Sementara itu, sumber daya material atau fasilitas dalam pelaksanaan program beasiswa Gunungkidul Cerdas berperan sebagai penunjang kegiatan. Sarana dan prasarana yang tersebut meliputi komputer, laptop, printer, dan perlengkapan ATK. Selain itu, dalam melaksanakan koordinasi dilaksanakan menggunakan ruang rapat pertemuan serta media sosial berupa grup *WhatsApp*. Aspek sumber daya informasi dalam pelaksanaan program

beasiswa Gunungkidul Cerdas selama ini tersedia dan berjalan dengan lancar. Penyampaian informasi dari dinas, sekolah, dan orang tua berjalan dengan lancar memanfaatkan media yang ada. Informasi terkait program beasiswa Gunungkidul Cerdas disampaikan melalui surat edaran menggunakan grup *WhatsApp* yang berlangsung dengan intens serta informasi dapat diterima dengan cepat. Aspek sumber daya finansial program beasiswa Gunungkidul Cerdas memanfaatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Besaran dana beasiswa tersebut dapat berubah setiap tahunnya menyesuaikan alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.



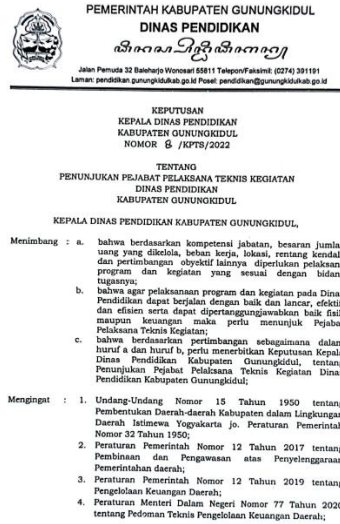
Gambar 2. Sumber daya manusia di Dinas Pendidikan

Ketiga, disposisi dalam pelaksanaan program mendapatkan respon yang positif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan para pihak yang terlibat dalam implementasi program beasiswa Gunungkidul Cerdas yang mendukung dan menyambut positif adanya program tersebut. Dukungan berbagai pihak tersebut juga dapat dilihat dari tanggapan terhadap adanya program beasiswa serta dukungan sikap implementor program yang melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kompetensi masing-masing.

NO.	NAMA	NAMA SEKOLAH	PANGKAB
1	SUHARTATI	SMPN 1 WONOSARI	1
2	Agus Mulyana	SMPN 1 WONOSARI	2
3	Lilik H	SMPN 1 WONOSARI	3
4	Dewi Susiliana	SMPN 1 WONOSARI	4
5	Dewi Alimatus	SMPN 1 WONOSARI	5
6	Salma Nur Hafidha	SMPN 1 WONOSARI	6
7	Fitri Nur Hafidha	SMPN 1 WONOSARI	7
8	Nugroho DP	SMPN 1 WONOSARI	8
9	Samudra	SMPN 1 WONOSARI	9
10	Fauzi Nugib	SMPN 1 WONOSARI	10
11	Wibisono	SMPN 1 WONOSARI	11
12	Siswanto	SMPN 1 WONOSARI	12
13	Siswanto	SMPN 1 WONOSARI	13
14	Kusuma	SMPN 1 WONOSARI	14
15	Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	15
16	Putri Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	16
17	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	17
18	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	18
19	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	19
20	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	20
21	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	21
22	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	22
23	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	23
24	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	24
25	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	25
26	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	26
27	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	27
28	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	28
29	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	29
30	Siti Nurhidayah	SMPN 1 WONOSARI	30

Gambar 3. Presensi kehadiran rapat sosialisasi di Dinas Pendidikan

Keempat, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas. Penyerahan tanggung jawab tersebut seperti yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan No. 8/KPST/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan program beasiswa di sekolah sendiri sebenarnya belum mempunyai struktur birokrasi yang sistematis. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh sekolah hanyalah berpedoman kepada struktur organisasi sekolah dan mengerjakan tugas sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.



Gambar 4. Surat keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pelaksana Dinas Pendidikan

Berdasarkan pembahasan yang dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul telah berjalan efektif ditinjau dari aspek-aspek implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Beasiswa Gunungkidul Cerdas Tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul

Edward III (dalam Hasbullah, 2016: 99) menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat empat aspek agar pelaksanaannya menjadi efektif yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Aspek komunikasi telah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi program oleh Dinas Pendidikan yang memaparkan mengenai program kerja pada Bidang SMP Selain itu, komunikasi juga dapat dilihat dari adanya Surat Edaran dari Dinas kepada

sekolah yang berisikan pemberitahuan mengenai program beasiswa beserta pedoman pelaksanaan program. Komunikasi juga didukung dengan adanya grup *WhatsApp* baik antara dinas, sekolah, dan orang tua yang menyebabkan komunikasi berlangsung dengan lancar dan lebih efisien.

Aspek sumber daya dalam pelaksanaan program telah terpenuhi, Hal ini dapat dilihat dari dukungan *stakeholder* pelaksana program baik Dinas Pendidikan dan juga *stakeholder* yang ada di sekolah. Dukungan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan program seperti komputer, laptop, perlengkapan ATK, dan ruang pertemuan untuk melakukan koordinasi. Dukungan sumber daya informasi dapat dilihat dengan adanya surat edaran dan informasi-informasi yang disampaikan oleh dinas ke sekolah melalui grup *WhatsApp*. Kemudian, dukungan sumber daya finansial berupa alokasi APBD Kabupaten Gunungkidul untuk anggaran dana beasiswa.

Aspek disposisi dalam pelaksanaan program beasiswa Gunungkidul Cerdas telah terpenuhi, yang dapat dilihat dari respon dan tanggapan dari berbagai pihak berkenaan dengan program. Pelaksana program menyambut dengan positif adanya beasiswa ini karena dapat meringankan beban orang tua khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kemudian, dalam pelaksanaan program implementor melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kompetensinya.

Terakhir, dukungan aspek struktur birokrasi, hal ini terlihat dengan adanya SK Kepala Dinas tentang penunjukkan pejabat pelaksana tugas termasuk Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter yang

bertanggung jawab terhadap program beasiswa Gunungkidul Cerdas.

Sedangkan analisis terhadap faktor penghambat program beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut.

Pertama, Keterbatasan dana APBD Kabupaten Gunungkidul yang dianggarkan untuk program beasiswa. Berdasarkan data, rata-rata setiap sekolah hanya menerima kuota 2 sampai 7 orang siswa penerima beasiswa. Padahal faktanya jumlah siswa miskin di setiap sekolah jauh lebih banyak. Oleh karenanya, kuota beasiswa Gunungkidul Cerdas tersebut belum mampu mengcover kebutuhan siswa.

Kedua, nominal beasiswa yang diterima siswa sedikit. Keterbatasan dana beasiswa ini juga menyebabkan jumlah nominal yang diterima oleh siswa kurang, yaitu Rp 500.000 untuk satu tahun. Tentunya jumlah ini sangat kurang untuk mencukupi biaya pendidikan siswa pada tingkat SMP.

Ketiga, tidak ada kontrol dalam penggunaan dana. Hal ini terjadi karena dana beasiswa tersebut langsung ditransferkan ke dalam rekening siswa dan hanya siswa dan orang tua yang dapat mengambil langsung ke bank. Selain itu, tidak adanya laporan penggunaan dana menyebabkan sekolah dan Dinas Pendidikan tidak dapat melacak penggunaan dana beasiswa tersebut.

Keempat, proses pencairan beasiswa yang cukup lama. Berdasarkan penjelasan dari sekolah, proses pencairan dana beasiswa bisa mencapai lebih dari satu bulan lamanya. Hal ini disebabkan oleh proses administrasi yang ada di bank mitra pelaksana program beasiswa tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul dinilai sudah efektif. Proses komunikasi antara pelaksana program berjalan dengan intens melalui rapat koordinasi dan sosialisasi. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan grup *WhatsApp*. Sumber daya yang berperan dalam pelaksanaan program beasiswa Gunungkidul Cerdas, yaitu: sumber daya manusia, sumber daya material (fasilitas), sumber daya informasi, dan sumber daya finansial. Implementor berusaha melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kompetensinya. Program beasiswa sendiri menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP melalui SK Kepala Dinas dan Kepala Sekolah.
2. Faktor pendukung implementasi program beasiswa Gunungkidul Cerdas tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul, yaitu (1) Koordinasi dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan berjalan secara intens. (2) Sumber daya manusia yang berkompeten yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. (3) Dukungan sarana prasarana penunjang seperti komputer, laptop, ATK, ruangan pertemuan dan Grup *WhatsApp* untuk menyampaikan informasi. (4) Sumber daya informasi berupa surat edaran dan informasi-informasi yang disampaikan melalui grup *WhatsApp*. (5) Sumber daya finansial berupa alokasi APBD Kabupaten Gunungkidul.
3. Faktor penghambat implementasi program beasiswa Gunungkidul Cerdas

tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 1) Jumlah kuota penerima beasiswa yang terbatas. 2) Jumlah nominal beasiswa yang kurang mencukupi. 3) Tidak ada kontrol dalam penggunaan dana. 4) Proses pencairan beasiswa cukup lama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, saran yang dapat diberikan yaitu: (1) Meningkatkan alokasi dana APBD Kabupaten Gunungkidul untuk beasiswa Gunungkidul Cerdas. (2) Membuka dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan organisasi pendidikan untuk memunculkan alternatif beasiswa lain. (3) Sekolah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua siswa. (4) Memberikan kewenangan kepada sekolah dalam mengelola dana beasiswa Gunungkidul Cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, S. N. Q. (2018). Tren Angka Putus Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 7 No. 4 h. 440-451*. Yogyakarta: UNY
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2021). Data Rata-Rata Lama Sekolah. Dikutip Dari <https://Yogyakarta.Bps.Go.Id/Indicator/26/318/1/-Metode-Baru-Rata-Rata-Lama-Sekolah.Html> Pada 26 Desember 2022
- Bappeda DIY. (2021). Data Angka Putus Sekolah Diy. Dikutip Dari http://Bappeda.Jogjaprovo.Go.Id/Dataku/Data_Dasar/Index/481-Angka-Putus-Sekolah-Aps-Per-Jenjang-Pendidikan. Pada Tanggal 26 Desember 2022

- Data.tempo.com. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Kemiskinan Maret 2022 Menurun. Dikutip Dari <https://Data.Tempo.Co/Data/1493/Jumlah-Penduduk-Miskin-Dan-Tingkat-Kemiskinan-Maret-2022-Menurun> Pada Tanggal 25 Desember 2022
- Databoks Katadata. (2021). Terdapat 157 Ribu Siswa Putus Sekolah Pada Tahun Ajaran 2019/2020. Diakses Dari <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/01/11/Terdapat-157-Ribu-Siswa-Putus-Sekolah-Pada-Tahun-Ajaran-20192020> Pada Tanggal 7 Maret 2022
- Kompas.Com. (2021). Putus Sekolah Bukan Sekadar Angka. Diakses Dari <https://Www.Kompas.Id/Baca/Opini-Publik/2022/03/02/Putus-Sekolah-Bukan-Sekadar-Angka> Pada Tanggal 7 Maret 2022
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jei/Article/View/1034>
- Nursita, L., & P, B. S. E. (2022). Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), Art. 1. <https://Doi.Org/10.37479/Jeej.V4i1.11894>
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Rachmawati, I. K. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Siswa*. Jakarta: Kencana
- Tribun Jogja.com. (2022). Angka Putus Sekolah Di Gunungkidul Masih Tinggi. Dikutip Dari <https://Jogja.Tribunnews.Com/2018/03/02/Angka-Putus-Sekolah-Di-Gunungkidul-Masih-Tinggi>. Pada Tanggal 26 Desember 2022
- Unnes. (2017). Mengoptimalkan Keunggulan Pendidikan Di Indonesia. Retrieved From Mengoptimalkan Keunggulan Pendidikan Di Indonesia: <https://Unnes.Ac.Id/Gagasan/Mengoptimalkan-Keunggulan-Pendidikandi-Indonesia>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Peningkatan Akses Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://Doi.Org/10.24246/J.Jk.2019.V6.I1.P44-53>